Pertemuan 1 PENDAHULUAN

Landasan Pendidikan Pancasila

Landasan Historis

Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidupnya sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Setelah melalui proses panjang nilai-nilai Pancasila melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan negara RI menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.

Landasan Kultural Pancasila sebagai kepribadian dan

jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam pancasila merupakan hasil pemikiran dari tokohtokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup.

Landasan Yuridis

- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Penilaian hasil Belajar Mahasiswa
- SK No. 38/ Dikti/ Kep./2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MKPK di PT.

Landasan Filosofis

 Secara filosofis dan obyektif, nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara RI

Tujuan Pendidikan Pancasila

- Tujuan Nasional Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
- Tujuan Pendidikan Nasional Menurut Pancasila dan UUD 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Tujuan Pendidikan Pancasila

Visi dan Misi Pendidikan pengembangan Kepribadian

Misi: Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

Visi: Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

- Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya.
- Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan menganalisa masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya.
- Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahanperubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- Mengantarkan mahasiswa memiliki kemmapuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila Yang Berhasil:

- 1. Beriman dan bertawa terhadap Tuhan YME
- 2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
- 3. Mendukung persatuan bangsa
- 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas` kepentingan perorangan
- 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pertemuan 2

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Cara Berpikir Filsafati

 Pengertian Filsafat Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa yunani yaitu philosophia:philo/philos/philein yang artinya cinta/pecinta/mencintai dan sóphia, yang berarti kebijakan/wisdom/kearifan/hikmah/hákikat kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijakan atau hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu.

- Pada umumnya terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu ada pengertian lain yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup.
- Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dan filsafat dalam arti praktis.

Sistem Filsafat

Suatu ajaran filsafat yang bulat akan mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, filsafat hidup, dan tata nilai (etika), termasuk teori terjadinya pengetahuan manusia dan logika.

Aliran-Aliran Filsafat

- Aliran Materialisme
 Hakikat realitas kesemestaan termasuk mahluk hidup, manusia ialah materi.
- Aliran Idealisme/Spiritualisme
 Ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia.
- Aliran Realisme
 Sintesis antara jasmaniah dan rohaniah, materi dengan non materi.

Nilai-nilai Pancasila Berwujud dan Bersifat

- Filse de sila sebagai pandangan hidup bangsa.
 - Pancasila sebagai dasar negara.
 - Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila.
 - Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh.

- Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada pasal-pasalnya.
- Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
- Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum tertampung dalam Pembukaan UUD 1945 perlu diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

- Aspek Ontologi
 Ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya dengan metafisika.
- Aspek Epistemologi
 Bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.
- Aspek Aksiologi
 Nilai, manfaat, pikiran atau ilmu/teori.

Nilai-nilai Pancasila Menjadi Dasar dan Arah Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

- Hubungan Vertikal
- Hubungan Horizontal
- ► Hubungan Alamiah

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK (1)

Pertemuan 3

bidang etika politik

- Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia disebut etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Etika berkaitan dengan norma moral.
- Etika politik masuk dalam lingkungan filsafat. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dsb.

- •Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab.
- •Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif.

Prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya citacita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan, dan struktur sosial budaya masyarakat masingmasing dan keadilan sosial.

Legitimasi kekuasaan

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan yaitu dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.

Legitimasi kekuasaan

- Legitimasi kekuasaan meliputi:
 - Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang negara (kekuasaan negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral.
 - Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Legitimasi moral dalam kekuasaan

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

nilai

- Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya.
- Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengrahkan sikap dan perilaku manusia.
- Cita-cita, gagasan, konsep, ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak.

Tiga kategori nilai (Notonogoro)

- Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas.
- 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian

- Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.
- Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.
- Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan (karsa, etika)
- Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak.

Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis

- Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- Nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila).
- Nilai Praksis adalah pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental.

moral

- Moral berasal dari kata mos (mores) yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan.
- Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
- Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsipprinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia.

norma

- Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.
- Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:
 - a. Norma agama, sanksinya dari Tuhan
 - b. Norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
 - c. Norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.
 - d. Norma hukum, sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara.

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK (2)

Pertemuan 4

Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara RI

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta universum. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara RI

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya.

▶ Sila ketiga: Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hal dan kewajiban tanggungjawabnya pada negara, khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa.

▶ Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim musyawarah dan mufakat.

Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasilá, yaitu:

- Pokok pikiran pertama, negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga.
- Pokok pikiran kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Pokok pikiran ketiga, menyatakan negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.
- Pokok pikiran keempat, menyatakan bhawa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah yang fundamental, karena didalamnya terkandung konsep-konsep;
 - Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara (negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat), dan asas kerohanian negara (pancasila).
 - Ketentuan diadakannya UUD, hal ini menunjukkan adanya sumber hukum.

Makna nilai-nilai setiap sila pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), dan yang seharusnya ada adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan normanorma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

3. Persatuan Indonesia.

Persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dann keamanan.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusankepütusan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Kelima pancasila merupakan satu kesatuan

- Terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan
- Masing-masing bagian mempunyai fungi dan kedudukan tersendiri
- Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi
- 4. Bersatu untuk mewujudkan keseluruhan
- 5. Keseluruhan membina bagian-bagian
- 6. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu kesatuan.

Konsep negara pancasila

- 1. Sifat sosialistis religius.
- 2. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
- 3. Semangat Persatuan.
- 4. Musyawarah.
- 5. Menghendaki keadilan sosial.

Ide pokok bangsa dan kebangsaan indonesia

- Keseimbangan antara golongan agama (islam) dan golongan nasionalis (negara theis demokrasi)
- Keseimbangan antara sifat individu dan sifat sosial (aliran monodualisme)
- 3. Keseimbangan antara ide-ide asli Indonesia (paham dialektis)

Paham integralistik

- Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain dalam masyarakat.
- Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.
- 3. Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan.
- Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran.

Paham integralistik

- 5. Kesertiakawanan sosial, nondiskriminatif,
- Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.
- 7. Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata pergaulan dunia dan universal.
- 8. Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Etika politik lebih banyak bergerak dalam wilayah dimana seseorang secara ikhlas dan jujur melaksanakan hukum yang berlaku tanpa adanya rasa takut kepada sanksi daripada hukum yang berlaku.

Ancaman dari dalam negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa

- Masih lemahnya pengamalan agama dan munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit.
- Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah
- Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.

Ancaman dari dalam negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa

- Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
- Kurangnya keteladanan bersikap dan berperilaku sebagai pemimpin bangsa.

Ancaman dari luar negeri berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa

- Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam.
- Makin tingginya intensitas intervenai kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Etika kehidupan berbangsa (tap mpr no.vi/mpr/2002

- 1. Etika sosial dan budaya
- 2. Etika politik dan pemerintahan
- 3. Etika ekonomi dan bisnis
- 4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
- 5. Etika keilmuan
- 6. Etika lingkungan

Pertemuan 5

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL (1)

Pengertian Ideologi

- Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat.
- Dalam arti kata luas istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif (ideologi terbuka)

- Dalam perkembangannya, ideologi mempunyai arti yang berbeda, yakni:
- 1. Weltanschuung, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat, negara (science of ideas).
- 2. Pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu dan karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup.
- 3. Ideologi bersifat belief system.

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Kita mengenal berbagai istilah ideologi, sperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Makna Ideologi Bagi Negara

- Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indoonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan.
- Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara.

Teori (Paham) Mengenai Dasar Negara

Teori Perseorangan (Individualistik)

Sarjana-sarjana yang membahas teori individualistik adalah Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Pada intinya, menurut teori ini negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu. Hal ini mempunyai pengertian bahwa negara dipandang sebagai organisasi kesatuan pergaulan hidup manusia yang tertinggi.

▶ Teori golongan

Teori ini diajarkan oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentanganpertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk menindas golongan ekonomi lemah. Yang dimaksud golongan ekonomi kuat adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Menurut Marx, negara terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat meliputi tiga fase, yaitu fase borjuis, fase kapitalis, dan fase sosialis komunis.

Pancasila Bersifat Integralistik

- Mengandung semangat kekeluargan dalam kebersamaan.
- Adanya semangat kerja sama (gotong royong).
- 3. Memelihara Persatuan dan kesatuan.
- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Teori Kebersamaan (Integralistik)

Teori integralistik semula diajarkan olehh Spinoza, Adam Muhler, dll, yang mengemukakan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Persatuan masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat yang organis.

Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lain

▶ Ideologi Liberalisme

Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.

- ▶ Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta individualisme.
- Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya.

- Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas.
- ▶ Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial.

Ideologi Sosialisme

- Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme-Leninisme.
- Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.

Ideologi Sosialisme

- Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional
- Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri.
- Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.
- Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai ideologi terbuka.
- Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar.

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

- Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- Pengalaman sejarah kita di masa lampau.
- Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilainilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sifat Ideologi

Dimensi Realitas

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber dari nilainilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.

Sifat Ideologi

Dimensi Idealisme

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal.

Dimensi Fleksibilitas

Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu.

Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

- Stabilitas Nasional yang dinamis
- Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
- Mencegah berkembangnya paham liberal.
- Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Pertemuan 6 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL (2)

Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lain

Ideologi Liberalisme

Inggrislah yang memulai timbulnya liberalisme yang diakibatkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan (aufklarung) yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar pada rasio. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini.

- ► Liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai mahluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, dan empirisme, serta individualisme.
- Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya.

- Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materiil yang melimpah dan dicapai dengan bebas.
- ▶ Paham liberalisme selalu mengaitkan aliran pikirannya dengan hak asasi manusia yang menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai mahluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai mahluk pribadi dan mahluk sosial.

Ideologi Sosialisme

- Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx. Ajaran Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin, sehingga ajarankomunis melandaskan pada teori Marxisme-Leninisme.
- Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan agama dikatakan sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.

Ideologi Sosialisme

- Masyarakat komunis tidak bercorak nasional, masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional
- Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas, yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tenteram dengan tidak adanya hak milik atas alat produksi dan hapusnya pembagian kerja.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri.
- Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.
- Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

- Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai ideologi terbuka.
- Sekalipun ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak nalar.

Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

- Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- Pengalaman sejarah kita di masa lampau.
- Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilainilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sifat Ideologi

Dimensi Realitas

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber dari nilainilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi itu tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.

Sifat Ideologi

Dimensi Idealisme

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal.

Dimensi Fleksibilitas

Melalui pemikiran baru tentang dirinya, ideologi itu mempersegar dirinya, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu.

Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

- Stabilitas Nasional yang dinamis
- Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
- Mencegah berkembangnya paham liberal.
- Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Pertemuan 7

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Pengertian Identitas

- Kata identitas berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.
- Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri.

►Kata "nasional" dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompokkelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, bahasa, agama, maupun non fisik seperti keinginan-cita-cita, dan tujuan.

- Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento:2005)
- Proses pembentukan identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman.

- Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan menjadi ciri atau identitas nasional mempunyai indikator sebagai berikut:
- Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud`dalam kehidupan sehari-hari.
- Lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara.
- 3. Alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi.
- 4. Tujuan yang ingin dicapai yang bersifat sinamis dan tidak tetap.

Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional

- * Sejarah
- * Kebudayaan (akal budi, peradaban, pengetahuan)
- * Budaya Unggul
- × Suku bangsa
- * Agama
- * Bahasa

Revitalisasi Pancasila Sebagai Pemberdayaan Identitas Nasional

Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional, perlu ditempuh dengan revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.

Pertemuan 9

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

Latar belakang

- Masa kejayaan beberapa negara kerajaan , diantaranya Swiwijaya dan Majapahit.
- Sriwijaya mengalami masa jaya selama 600 tahun (tahun 600-1300).
- Majapahit muncul menggantikannnya mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad 14.
- Runtuhnya majapahit , munculnya banyak kerajaan kecil membuka peluang masuk dan meluas imperialisme dan kolonialisme barat.

Kehidupan nenek moyang bangsa indonesia

- Nenek moyang bangsa Indonesia telah membangun kebudayaan dan cara hidupnya sendiri.
- Nenek moyang bangsa Indonesia hidup berkelompok-kelompok.
- Nenek moyang bangsa Indonesia percaya setiap manusia yang hidup terdiri dari jasmani dan rohani.

Masa penjajahan

- ▶ Portugis (1512)
- Belanda/VOC (1596)
- ▶ Inggris (1811)
- Belanda/Pemerintahan Hindia Belanda
- ▶ Jepang (1942)

Proklamasi kemerdekaan

- Dengan proklamasi Indonesia dapat mengatur dan membangun Indonesia menurut kehendak bangsa Indonesia sendiri.
- 18 Agustus 1945 UUD disahkan. Didalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tercantum lima dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakan PANCASILA.

- Istilah Pancasila pertamakali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14).
- Pancasila sebagai dasar negara pertamakali diusulkan oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan.

- Pada tanggal 22 Juni usul-usul mengenai dasar negara y1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberinama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-serta ang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI.
- Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberinama Piagam Jakarta, yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila.
- Panitia Sembilan tersebut 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Moh. Hatta, 3. Mr.A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoel Kahar Muzakar, 6. haji agus Salim, 7. Mr. Achmad Soebarjo, 8. K.H. wahid Hasjim, dan 9. Mr. Muh. Yamin.

Pancasila sebagai dasar negara

- Pancasila dipakai untuk mengatur penyelenggaraan negara.
- Adanya sejak tgl 18 Agustus 1945, yaitu saat disahkan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI dimana tercantum Pancasila sebagai dasar negara.
- Merupakan sumber dari segala sumber hukum
- Secara hukum tidak dapat diubah.

Pertemuan 10-11

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

Dua tafsir pokok pancasila sebagai dasar negara

- Pancasila sebagai dasar negara secara umum tidak dapat diubah (melekat pada kelangsungan negara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945)
- Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara

Kedudukan pancasila

- Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia
- Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara

- Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara
- Pancasila sebagai dasar negara adanya sejak 18 Agustus 1945
- Merupakan sumber dari segala sumber hukum itu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan RI.
- Tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamentil.

Pancasila sebagai pandangan hidup

- Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Adanya sejak dulu, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri.
- Mempunyai sanksi moral /sanksi sosial
- Tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Peranan lainnya dari pancasila

- Pancasila jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
- Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia

Undang-undang dasar di indonesia

UUD negara adalah peraturan perundangundangan negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis.

Yang harus dimuat dalam uud

- Bentuk negara dan organisasinya
- Susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas.
- Hak-hak fundamentil warga negara dan badanbadan hukum termasuk bidang politik
- Dan lain-lain yang bersifat mendasar

Cara terjadinya UUD

- Cara pemberian (grant)
- Melalui suatu revolusi
- Dengan pembuatan

UUD yang pernah berlaku di indonesia

- UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
- Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
- UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- ▶ UUD 1945 (5 Juli 1959-sekarang)

Pancasila sumber tertib hukum republik indonesia

- Tertib hukum adalah keseluruhan peraturan hukum secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi empat syarat, yaitu:
- a. Adanya kesatuan subjek (penguasa) yang mengadakan peraturan-pertauran hukum
- b. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan pertauran hukum itu.
- c. Ada kesatuan wilayah dimana keseluruhan hukum itu berlaku.
- d. Ada kesatuan waktu dalam mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku.

Tata urutan perundang-undangan indonesia menurut UU No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undangundang
- 3. Peraturan Pemerintah
- 4. Peraturan Presiden
- 5. Peraturan daerah
 - a. Perda provinsi
 - b. Perda kabupaten/kota
 - c. Perda desa

d.

Pertemuan 12 HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Warga negara indonesia (WNI)

Warga 12 Tahun 2004 lah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Siapa wni? (Pasal 4 UUKI)

- a.Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI)
- b.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu waraa neaara Indonesia.

- c.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Asing.
- d.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- e.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus (300) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

- I. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m.Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Status anak wni (Pasal 5 UUKI)

- 1. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- 2. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Pilihan menjadi warga negara Republik Indonésia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- 2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundangundangan.
- 3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga (3) tahun setelah anak berusia delapan belas (18) tahun atau sudah kawin.

Hubungan negara dan warga

- Neggra Indonesia sesuai dengan Konstitusi, berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, secara jelas tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945.
- Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai

warga negara.

▶ Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional.

Asas Kewarganegaraan (asas kewarganegaraan umum)

- Asas kelahiran (Ius Soli)
- Asas keturunan (lus Sanguinis)
- Asas Kewarganegaraan Tunggal
- Asas KewarganegaraanGanda Terbatas

Asas Kewarganegaraan

K Asas Kepentingan Nasional

- 2. Asas Perlindungan Maksimum
- 3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan pemerintahan
- 4. Asas kebenaran substantif
- 5. Asas non-diskriminatif
- 6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM
- 7. Asas keterbukaan
- 8. Asas publisitas

Masalah Status Kewarganegaraan

- ▶ Apatride
- ▶ Bipatride
- Multipatride

Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

- ► Karena kelahiran
- ► Karena Pengangkatan
- Karena dikabulkan permohonan
- Karena kewarganegaraan
- ► Karena perkawinan
- ► Karena pernyataan

- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
- Wajib mengikuti pendidikan dasar.

Hak negara/pemerintah

- Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
- Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

Kewajiban

- Melindungi-sebengen bangspilindergsig dan seluruh tumpah
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.

rewajiban

- Negation pendidikan dasar.
- Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
- Negara memprioritaskan angaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
- Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

rewajiban

- The gargemajukan kelebudayan manusia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
- Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
- Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

rewajiban

- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Karakteristik Warga Negara Yang Bertanggungjawab

- Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab.
- Bersikap kritis
- Melakukan diskusi dan dialog
- Bersikap ferbuka
- Rasional
- Adil
- Jujur

Karakteristik Warga Negara Yang Mandiri Memiliki kemandirian

- Memiliki tanggungjawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara
- Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi
- Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun
- Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

Pertemuan 13

POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA

pengertian

- Politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.
- Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.

- Str ategi merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ipoleksosbudhankam)
- Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan keputusan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.
- Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks politik nasional.

Penyusunan politik dan strategi nasional

- Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
- Suprastruktur politik
- Infrastruktur politik

Stratifikasi politik nasional

- Tingkat penentu kebijakan puncak
- Tingkat kebijakan umum
- Tingkat penentu kebijakan khusus
- Tingkat penentu kebijakan teknis

Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan kepaduan tata nilai, struktur, dan proses. Karena itu diperlukan sistem manajemen nasional yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan.

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)

Berlandaskan pasal 30 UUD 1945 Ayat (2) kita menganut Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yaitu sistem pertahanan yang melibatkan segenap potensi yang dimiliki negara, dimana rakyat berperan sebagai kekuatan dasar dan TNI sebagai kekuatan inti.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi

Pemberantasan korupsi sejak era reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama 1998-2004, melaksanakan kebijakan hukum (ekonomi, politik, sosial, HAM) dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi. Tahap kedua 2004-2008. Pembangunan hukum dalam pemberantasan korupsi di masa mendatang, seharusnya menanamkan paradigma baru yaitu bahwa pencegahan dan penindakan serta pengembalian aset korupsi merupakan tiga pilar utama yang berkaitan erat dan harus dilaksanakan oleh KPK secara konsisten.

Otonomi daerah

- Otonomi secara sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas adalah berdaya.
- Jadi otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Otonomi daerah

- Penyelenggaraan negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.
- Sistem sentralisasi yaitu jika urusan yang berkaitan dengan aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat.
- Sistem desentralisasi adalah sistem ketika sebagian urusan pemerintahan diserahkan pada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.

Latar belakang OTDa

- Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporakporandakan hampir seluruh sendisendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama.
- Sebagai respon dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu melaksananakan Otda.

Tujuan dan prinsip OTDA

- Untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat.
- Untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
- Agar perhatian lebih fokus kepada daerah.
- Agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masingmasing.

Otda dan demokratisasi

Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang berintikan kebebasan individu, kelompok, daerah untuk mengatur, mengendalikan, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

PERTEMUAN 14

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pancasila Paradigma Pembangunan Iptek

- Paradigma mempunyai pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah.
- Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.
- Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menganduing arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Konsep yang harus diperhatikan dalam kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional

- Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa.
- Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional
- Pancasila merupakan arah pembangunan nasional
- Pancasila merupakan etos pembangunan nasional
- Pancasila sebagai moral pembangunan

Prinsip Pembangunan Nasional

- Hormat terhadap keyakinan religius setiap orang
- Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subyek (manusia seutuhnya)
- Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarianisme
- Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional.
- Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan

Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ipoleksasbudhankam

Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman.

Untuk itu kita harus memperhatikan peranan dan dan kedudukan Pancasila yaitu:

- 1.Pancasila sebagai ideologi terbuka
- 2. Wawasan kebangsaan (nasionalisme)

Pengembangan Politik

- Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan:
 - Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka
 - 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat
 - 3. Pendidikan politik kepada masyarakat
 - 4. Pemilu yang lebih berkualitas

Pengembangan Sosial Budaya

- Pancasila dapat menjadi credible yaitu dimana masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila, melalui cara:
 - 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia
 - 2. Diperlakukan secara manusiawi
 - 3. Mengalami solidaritas
 - 4. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik
 - 5. Kesejahteraan yang layak sebagai manusia

Pengembangan Ekonomi

- Pengembangan dan peningkatan mutu SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan, yaitu:
 - 1.Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang
 - 2.Mampu menggunakan Iptek untuk mengelola SDA secara efektif efisien, lestari.
 - 3. Memiliki etos profesional

Pengembangan Hankam

- Pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita banhsa yang terjabar sebagai berikut:
 - 1. Nilai-nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara
 - 2. Nilai-nilai yang menyangkut sistem/struktur kehidupan masyarakat
 - 3. Nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem/struktur kehidupanmasyarakat

Bentuk Pelaksanaan

- Petrosaksika/pengamalan Pancasila dibedakan dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:
- Pelaksanaan objektif, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut kedalam peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengamalan Pancasila Sebagai Dasar Negara

- Yaitu berupa pelaksanaan pancasila dalam wujud tingkah laku, tindak tanduk, ataupun perbuatan-perbuatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam negara Indonesia.
- Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sanksi hukum.

Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan

Hidupgamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup dalam hidup sehari-hari, dimana dalam sikap hidup dituntut oleh kelima sila dari Pancasila.

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN

Pertemuan 15

Pemahaman Aktualisasi

Aktual artinya betul-betul ada, terjadi atau sesungguhnya. Aktualisasi adalah sesuatu mengaktualkan. Dalam hal ini adalah bagaimana nilai-nilai pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional

Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Ekonomi

 Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan, berkelanjutan.

Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Hukum dan HAM

- Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.
- Semua peraturan perundangundangan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara.

- ► HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki pribadi manusia secara kodrat.
- ► HAM tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak. Ini berarti bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Aktualisasi Pancasila Dalam Aspek Kesadaran Bela Negara

- Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan.
- Upaya bela negara merupakan kehormatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dengan secara adil dan merata.

Budaya Akademik

- Pengolahan ilmiah Pancasila, eksistensi pancasila, yaitu sebagai ideologi.
- Mengungkapkan ajaran yang terkandung dalam Pancasila.
- Studi Perbandingan ajaran Pancasila dengan ajaran lainnya.
- Pengolahan ilmiah mengenai pelaksanaan Pancasila

Kampus Sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM

Kampus dijadikan sebagai satu kehidupan ilmiah, dimana terdapat kebebasan berpikir dan berpendapat, kreativitas, argumentatif, tekun, dan melihat jauh ke depan sambil mencari manfaat praktis dari suatu ide atau penemuan.